



ANALISIS IMPLEMENTASI INTERNATIONAL WHALIN COMMISSION DI JEPANG PADA MASA PEMERINTAHAN SHINZO ABE (2015-2018)

Brigitha Leovani Pailo^{*1}, Agussalim Burhanuddin²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: brigithaleovanipailo04@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2024</p> <p>Revised : 25 April 2024</p> <p>Accepted : 28 May 2024</p> <p>Publication : 30 June 2024</p> <p>Keywords: International Regime, International Whaling Commission (IWC), Japan, Shinzo Abe, Whale Hunting</p> <p>Kata Kunci: Rezim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (IWC), Jepang, Shinzo Abe, Perburuan Paus</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This study analyzes the implementation of the International Whaling Commission (IWC) in Japan during the Shinzo Abe administration (2015-2018) with a focus on scientific and commercial whaling programs. This study uses library research. Whaling constitutes an inherent part of Japanese society with historical and cultural roots that span over centuries. The Japanese government initiated a new special permit whaling program in Antarctica, called the New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean, replacing the JARPA II program. This initiative intends to enhance the precision of data on the biology and ecology of Antarctic minke whales, as well as explore the composition and dynamics of marine ecosystems in Antarctica. In November 2016, the Japanese government presented a proposal for a specialized permit program in the North Pacific, named the New Scientific Whale Research Program in the Western North Pacific. After leaving, Japan continued commercial whaling in its territory. This study highlights the complexity of a country's political, economic, and cultural dynamics in responding to international regulations, as well as its impact on whale conservation and marine ecosystems.</i></p> <p>Abstrak: Studi ini menganalisis implementasi International Whaling Commission (IWC) di Jepang selama masa pemerintahan Shinzo Abe (2015-2018) dengan fokus pada program perburuan paus secara ilmiah dan komersial. Studi ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Perburuan paus di Jepang merupakan sebuah aspek bersejarah dan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Jepang selama berabad-abad. Pemerintah Jepang memulai program penangkapan ikan paus dengan izin khusus baru di Antartika, yang disebut the New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean, menggantikan program JARPA II. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi informasi biologi dan ekologi paus minke Antartika serta menyelidiki struktur dan dinamika ekosistem laut Antartika. Pada bulan November 2016, Pemerintah Jepang mengajukan proposal program izin khusus baru di Pasifik Utara, yang disebut the New Scientific Whale Research Program in the western North Pacific. Pasca keluarnya, Jepang lalu melanjutkan perburuan ikan paus komersial di wilayah sendiri. Studi ini menyoroti kompleksitas dinamika politik, ekonomi, dan budaya suatu negara dalam merespon regulasi internasional, serta dampaknya terhadap konservasi paus dan ekosistem laut.</p>
--	--

INTRODUCTION

Perburuan paus di Jepang merupakan sebuah aspek bersejarah dan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Jepang selama berabad-abad. Aktivitas perburuan paus telah menjadi bagian integral dari tradisi dan mata pencaharian di pesisir Jepang, dan hal ini telah membentuk pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap peran paus dalam sejarah, makanan, bahkan seni dan mitologi. Diperkirakan aktivitas perburuan paus dimulai sekitar tahun 1600, di mana penangkapan ikan paus komersial dimulai di belahan bumi utara menggunakan kapal layar dan tombak (*tukitori-ha*) (Takahashi et al., 1989, 107).

Selain peran praktis dalam pangan, paus juga telah mendapatkan tempat penting dalam budaya Jepang melalui seni dan mitologi. Dalam cerita rakyat dan mitos Jepang, paus sering kali dianggap sebagai makhluk yang memiliki karakteristik yang kuat dan spiritual, menjadi simbol kekuatan alam dan keberuntungan. Kaisar Tenmu, abad ketujuh Jepang Kuno selama periode Yamato-Asuka, menganut agama Budha dan melarang berburu dan makan daging hewan darat. Dengan adanya larangan tersebut, *Cetacea* yang sejenis ikan diizinkan untuk diburu (Bowett dalam Ohsumi 2004: 83). Hal ini mengarah pada pengembangan perburuan paus dan makan daging paus yang dikenal sebagai *Gyoshoku-bunka*.

Selama Perang Dunia II, kegiatan penangkapan paus oleh Jepang dan beberapa negara pengejaran paus lainnya mengalami penundaan, yang memungkinkan populasi paus pulih untuk sementara waktu. Namun, pasca Perang Dunia II, ketika pasokan protein hewani terbatas, perburuan paus dalam skala besar terjadi di Jepang. Meskipun penangkapan ikan paus saat ini jauh berbeda dengan masa sebelum pelarangan, namun hal ini masih tetap signifikan. Hampir 300 individu di Jepang terlibat dalam industri penangkapan ikan paus, walaupun kontribusi ikan paus terhadap konsumsi daging di negara tersebut hanya sekitar 0,1% pada tahun 2016, berdasarkan data pemerintah. Setiap tahun, sekitar 4-5.000 ton daging ikan paus masuk ke pasar domestik, setara dengan volume sekitar setengah buah apel per individu (McCurry, 2021).

Jepang bergabung dengan IWC pada tahun 1951, pada saat itu mayoritas negara anggota IWC merupakan negara *pro-whaling*, dan Jepang memiliki kebijakan yang searah dengan kebijakan IWC untuk mengelola dan melestarikan sumber daya paus secara internasional. Anggota *pro-whaling* ini awalnya tertarik untuk menjaga sumber daya ikan paus agar dapat dijadikan produk komersial, dan mereka tidak mendukung larangan perburuan paus yang bersifat permanen. Akan tetapi, seiring berjalannya

waktu, IWC bertransisi dengan mengubah fokusnya dari perburuan paus yang berkelanjutan dan pengembangan industri perburuan paus yang teratur menjadi lebih berorientasi pada konservasi paus, dengan tujuan menghentikan perburuan paus yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya dan melindungi populasi paus. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran signifikan dalam komposisi anggota IWC, yang kemudian didominasi oleh negara-negara yang *anti-whaling*.

International Whaling Commission (IWC) menjadi salah satu badan regulasi yang hadir dan bertanggung jawab atas pengelolaan perburuan paus dan konservasi ikan paus karena tingginya angka kematian paus yang menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang menarik perhatian dunia. *International Whaling Commission* (IWC) didirikan pada tahun 1949 dan bertujuan untuk menjalankan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang diterapkan sejak tahun 1946. ICRW dibentuk untuk menghentikan eksploitasi berlebihan pada spesies paus yang berisiko punah.

Fokus utama ICRW adalah memberikan perlindungan yang tepat pada populasi ikan paus dan mengatur industri perburuan paus secara berkelanjutan (*International Whaling Commission, n.d.*). Hal ini mencakup perlindungan spesies tertentu, penunjukan wilayah-wilayah tertentu sebagai cagar alam paus, penentuan batas penangkapan, musim penangkapan, dan laporan statistik untuk memperbaiki regulasi. Selain itu, IWC berupaya meminimalisir serangan kapal penangkapan paus terhadap ikan paus serta merancang *Conservation Management Plans* untuk mengendalikan isu-isu populasi yang termasuk dalam kelompok spesies kunci dan paling langka (Nova, 2019, 419).

Tahun 1982, IWC memutuskan untuk menghentikan perburuan paus dengan menerapkan *moratorium commercial whaling* (kuota tangkapan nol), yang mulai diberlakukan pada tahun 1986. Setahun setelah moratorium tersebut diberlakukan, Jepang mengajukan proposal kepada IWC yang berisi permohonan untuk melakukan *scientific whaling* (*International Whaling Commission, n.d.*). Dengan adanya *special permit* dari IWC, program *scientific whaling* dilakukan berdasarkan pasal V dan VIII ICRW (*Fitzmaurice, n.d.*) (Nova, 2019, 420). Ini adalah izin khusus yang memungkinkan pembunuhan, pengambilan, dan perawatan paus untuk tujuan penelitian ilmiah.

Jepang menjalankan program *scientific whaling* melalui *Institute of Cetacean Research* (ICR), yang merupakan lembaga semi-swasta terkait dengan Badan Perikanan

Jepang. Program *scientific whaling* pertama Jepang adalah JARPA, yang berlangsung selama 16 tahun di Samudra Antartika dengan kuota 300 paus minke. Setelah JARPA, ada program *scientific whaling* lainnya seperti JARPA II dan NEWREP-A. Di Samudera Pasifik Utara, ada program seperti JARPN, JARPN II, dan NEWREP-NP. Tujuan dari *scientific whaling* adalah untuk menilai status persediaan paus dan menyediakan data yang dapat mempengaruhi pencabutan moratorium (Nadratur, 2021).

Kebijakan perburuan paus Jepang akhirnya mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Shinzo Abe. Jepang membuat keputusan kontroversial untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada 26 Desember 2018, dan kemudian secara resmi meninggalkan IWC pada 30 Juni 2019. Keputusan ini dibuat setelah IWC menolak proposal Jepang untuk melanjutkan perburuan paus komersial dalam pertemuan tahunan di Brazil. Namun, Jepang menyatakan bahwa setiap operasi perburuan paus komersial yang akan datang akan dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang pasca keluar dari IWC.

Penelitian yang dilakukan oleh Fynn Holm (2019), yang ia tulis melalui Jurnal "*Japan's Whaling Policy: The Reasons for Leaving the International Whaling Commission*" membahas keputusan Jepang ini untuk menarik diri dari International Whaling Commission (IWC) dan pergeseran fokusnya dari perburuan paus di Antartika ke perburuan komersial di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Artikel ini mengkaji latar belakang sejarah dan politik kontroversi perburuan paus Jepang, menyoroti upaya Jepang untuk bernegosiasi mencapai kompromi di dalam IWC, dan alasan di balik keputusannya untuk keluar dari organisasi tersebut. Artikel ini juga mengulas sejarah perburuan paus Jepang, hubungannya dengan IWC, dan perkembangan perburuan paus di pesisir. Peran *Non-Governmental Organizations* dalam konflik antara kelompok pro-perburuan paus dan menyelidiki aktivis anti-perburuan paus. Fynn Holm berargumen bahwa keputusan Jepang untuk menarik diri dari International Whaling Commission (IWC) didorong oleh kombinasi alasan kebijakan domestik dan luar negeri (Holm, 2019). Hal yang tidak jauh beda juga dijelaskan oleh Hijria Khatimi melalui tesisnya "*Keluarnya Jepang dari International Whaling Commission (IWC) Tahun 2018*", dimana menyebabkan keluarnya Jepang dari International Whaling Commission (IWC) didasarkan pada beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang meliputi perilaku domestik, kebutuhan sosial-ekonomi, kondisi geografis, karakteristik topografi, dan sumber daya alam. Sementara itu, faktor eksternal meliputi faktor-faktor

non-domestik suatu negara seperti struktur sistem (Khatimi, 2020). Berbagai sumber literatur dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keluarnya Jepang dari *International Whaling Commission* (IWC) merupakan momentum yang kontroversial. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada dinamika pengimplementasian aturan *International Whaling Commission* (IWC) di masa pemerintahan Shinzo Abe.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis juga menggunakan Teori Rezim Internasional. Teori rezim internasional merupakan kerangka konseptual dalam studi hubungan internasional yang mencoba menjelaskan bagaimana aturan, norma, prinsip dan kebijakan bersama berkembang dan dipertahankan di tingkat internasional (Ari, 2018, 117). Rezim internasional dapat merujuk pada seperangkat aturan formal dan informal, institusi, serta norma yang mengatur perilaku negara-negara dalam suatu bidang tertentu, seperti perdagangan, lingkungan, atau keamanan. Dalam konteks *International Whaling Commission* (IWC) dan implementasinya di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe, teori rezim internasional mampu menjelaskan tentang bagaimana aturan dan kebijakan internasional terkait perburuan paus dibentuk, diadopsi, dan diimplementasikan oleh negara-negara yang terlibat, termasuk Jepang.

METHOD

Studi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan membaca, mempelajari, mencatat, dan menganalisis berbagai subjek penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka (Zed). Riset pustaka tidak memerlukan riset lapangan, dan fokusnya hanya pada bahan koleksi perpustakaan. Sugiyono (2012) mengatakan bahwa studi kepustakaan melibatkan literatur ilmiah, referensi, studi teoritis, dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Fadli, 2021, 35).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, yang menjelaskan dinamika pengimplementasian IWC di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe (2015-2018). Studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Untuk mendukung fokus penelitian, data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti laporan resmi, artikel, buku, jurnal, *e-book*, dan lainnya untuk memberikan dukungan sesuai dengan fokus penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Aktivitas Penangkapan Paus

Walau pada akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC, dinamika implementasi Rezim IWC di Jepang ini menarik untuk dilihat selama masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe (2015-2018), sebab mencakup sejumlah aspek yang relevan dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang signifikan dalam konteks konservasi, kebijakan lingkungan, dan diplomasi. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti dinamika implementasi *International Whaling Commission* di Jepang pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2015-2018).

Keputusan Jepang untuk keluar dari *International Whaling Commission* (IWC) pada tahun 2018 adalah hasil dari beberapa pertimbangan dan kebijakan yang telah berkembang selama beberapa tahun sebelumnya. Melalui disertasi berjudul "*Japan and the IWC: Investigating Japan's Whaling Policy Objectives*" karya Judith Woters, dikemukakan enam alasan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF), Kementerian Luar Negeri (MOFA), serta Badan Perikanan (FA) yang berada di bawah MAFF, dalam melakukan penangkapan paus (Aditama, 2017, 56).

1. Pertama, otoritas berpendapat bahwa Jepang harus melakukan penangkapan paus sebagai bagian dari program penelitian ilmiah untuk membuktikan bahwa beberapa spesies dapat ditangkap tanpa membahayakan kelangsungan populasi.
2. Kedua, Jepang memiliki landasan hukum yang disebutkan dalam artikel 5 Konvensi Internasional untuk *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW).
3. Ketiga, pembatasan aktivitas penangkapan paus dapat mengakibatkan penurunan anggaran dan kekuatan politik Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Badan Perikanan.
4. Keempat, diharapkan bahwa penangkapan paus akan memberikan dorongan bagi industri dan memainkan peran dalam mencabut moratorium, sehingga memperkuat posisi Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Badan Perikanan.
5. Kelima, otoritas di Jepang memiliki kekhawatiran bahwa larangan menangkap paus dapat memberikan dampak negatif pada sektor lain yang berada di bawah pengawasan mereka.
6. Keenam, dorongan dari negara-negara barat terkait konsumsi daging paus dianggap

mirip dengan kebiasaan negara-negara lain yang mengonsumsi daging sapi atau babi (Aditama, 2017, 56).

Beberapa faktor dan alasan lain yang mempengaruhi transisi ini turut melibatkan pertimbangan ekologi, budaya, dan politik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menunjukkan transisi keinginan Jepang untuk keluar dari IWC:

1. Ketidaksetujuan dengan Moratorium IWC.

Sejak 1986, IWC memberlakukan moratorium atas perburuan ikan paus untuk tujuan komersial. Jepang mengalami ketidaksetujuan terhadap moratorium ini, menganggapnya sebagai langkah yang seharusnya sementara untuk memungkinkan populasi paus pulih. Jepang menyatakan keinginan untuk melanjutkan perburuan ikan paus untuk tujuan komersial, khususnya di wilayah perairan eksklusifnya. Alasan yang diberikan adalah bahwa beberapa populasi ikan paus telah pulih dan dapat diatur secara berkelanjutan.

2. Argumen Budaya dan Tradisional.

Pemerintah Jepang menggunakan argumen budaya dan tradisional untuk mendukung keputusannya. Mereka mengatakan bahwa perburuan paus adalah bagian dari warisan budaya Jepang yang perlu dipertahankan. Hal ini juga menegaskan keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pangan asing. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa perburuan ikan paus dapat menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat negaranya. Keputusan ini tentunya memicu reaksi campuran di tingkat internasional, dengan beberapa negara dan kelompok lingkungan mengecamnya sebagai langkah yang merugikan bagi konservasi paus global. Di sisi lain, pemerintah Jepang berpegang pada pandangan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan demi menjaga warisan budaya mereka.

Pembahasan

Dinamika Pengimplementasian International Whaling Commission di Jepang pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2015-2018)

Segala tindakan negara selalu menjadi fokus langsung dari pembentukan rezim internasional. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku negara yang cenderung berubah bersifat subyektif terhadap pencapaian hasil yang diinginkan. Sama seperti halnya keputusan keluarnya Jepang dari IWC, tindakan tersebut mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan budaya suatu negara dalam merespon regulasi internasional.

Pada tahun 2015, Pemerintah Jepang memulai program penangkapan ikan paus dengan izin khusus baru di Antartika, yang disebut *the New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean* (NEWREP-A) menggantikan program JARPAII mulai tahun 2014/2015 (International Whaling Commission, n.d.).

Samudra Antartika memiliki ekosistem laut yang unik dan berpotensi menjadi tempat sumber daya hayati melimpah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pangan dan keperluan lainnya. Dewasa ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa perubahan lingkungan laut akibat dampak perubahan iklim yang signifikan di Antartika berdampak pada lingkungan global secara keseluruhan. Untuk melestarikan sumber daya ikan paus sambil memanfaatkannya secara berkelanjutan dan untuk memahami serta memprediksi dampak perubahan iklim, penting untuk memahami ekosistem laut dan dinamikanya di kawasan Antartika melalui pengumpulan, akumulasi, dan analisis informasi ilmiah. Latar belakang inilah yang melandasi rancangan NEWREP-A (The Institute of Cetacean Research, n.d.).

Program ini merupakan proposal formal untuk program izin khusus yang diajukan oleh Jepang kepada *International Whaling Commission* (IWC) agar bisa menangkap paus di Antartika yang diadakan pada tahun 2015/2016 sesuai musim di Antartika. NEWREP-A mempunyai dua fokus penelitian utama, yakni: meningkatkan akurasi informasi biologi dan ekologi untuk menerapkan Prosedur Pengelolaan Revisi (RMP) pada paus minke Antartika; serta menyelidiki struktur dan dinamika ekosistem laut Antartika melalui pembangunan model ekosistem (The Institute of Cetacean Research, n.d.).

Tujuan ini berkaitan dengan upaya pemanfaatan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya hayati laut, terutama stok ikan paus di kawasan Antartika. RMP merupakan mekanisme yang teruji dan aman untuk menghitung kuota komersial paus balin yang dirancang untuk memberikan rekomendasi manajemen kepada Komisi oleh Komite Ilmiah IWC. Model ekosistem tidak hanya digunakan untuk menjelaskan dan memahami struktur serta dinamika ekosistem laut Antartika, tetapi juga penting untuk tujuan pengelolaan dan konservasi (The Institute of Cetacean Research, n.d.). Sayangnya, menurut laporan IWC, antara tahun 1980 hingga 2015, Jepang telah menangkap lebih dari 400.000 paus dari semua spesies, yang merupakan 80% dari total penangkapan ikan paus di dunia (Bo, 2021).

Pada bulan November 2016, Pemerintah Jepang mengajukan lagi proposal program izin khusus baru di Pasifik Utara yang disebut *the New Scientific Whale*

Research Program in the western North Pacific (NEWREP-NP) (The Institute of Cetacean Research, n.d.). Penelitian NEWREP-NP bertujuan untuk mengoptimalkan penetapan batas tangkapan berkelanjutan paus minke di perairan pesisir Jepang (penyempurnaan penghitungan batas tangkapan oleh *Scientific Committee of the International Whaling Commission*) dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menghitung batas tangkapan yang tepat untuk paus sei di perairan lepas pantai dengan mengumpulkan informasi mengenai struktur stok khusus yang diterapkan pada Prosedur Pengelolaan Revisi (RMP), dan parameter biologis seperti kematangan seksual dan umur. Jangka waktu penelitian adalah 12 tahun dan tinjauan penilaian tengah semester akan dilakukan setelah enam tahun pertama (The Institute of Cetacean Research, n.d.).

Pada Januari dan Februari 2017, dilaksanakan Pertemuan Panel Ahli untuk meninjau rencana NEWREP-NP yang diusulkan. Sebagai hasil dari diskusi, Panel Ahli merekomendasikan untuk melakukan pekerjaan tambahan dan revisi yang perlu diimplementasikan dalam NEWREP-NP.

Sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Panel Ahli, para ilmuwan Jepang melakukan pekerjaan tambahan yang dianggap ilmiah secara valid, dan Pemerintah Jepang merevisi rencana yang diusulkan tersebut. Rencana tersebut kemudian diajukan kembali kepada *Scientific Committee* pada Mei 2017. Jepang menjelaskan secara teliti landasan ilmiah NEWREP-NP kepada *Scientific Committee*, dan *Scientific Committee* mempertimbangkan rencana yang sudah direvisi. Setelah menentukan bahwa NEWREP-NP telah mendapatkan evaluasi yang adil dari *Scientific Committee*, Jepang menyelesaikan NEWREP-NP dan memulai implementasinya pada Juni 2017 (The Institute of Cetacean Research, n.d.).

Hingga puncaknya, pada tanggal 26 Desember 2018, Jepang merilis pernyataan mengenai keputusan mereka untuk meninggalkan *International Whaling Commission* (IWC) dan melanjutkan perburuan ikan paus komersial di wilayah sendiri, menimbulkan kritik tajam di seluruh dunia. Menteri lingkungan Inggris pada saat itu, Michael Gove, menyampaikan rasa kecewanya dan Greenpeace menyebut keputusan tersebut tidak sejalan dengan komunitas internasional dan dianggap licik karena diumumkan di tengah musim liburan (Normile, 2023)

Jepang sendiri menunjukkan secara jelas keinginannya untuk melanjutkan perburuan ikan paus komersial, yang telah dilarang berdasarkan moratorium IWC sejak tahun 1986. Dalam waktu tersebut, Jepang menggunakan klausa dalam traktat IWC

yang memungkinkan anggota menangkap ikan paus untuk tujuan ilmiah dan menjual dagingnya. *The Institute of Cetacean Research* (ICR) di Jepang terutama, menangkap ikan paus minke, dengan beberapa tangkapan kecil ikan paus sei, ikan paus Bryde, dan beberapa spesies lainnya. Ilmuwan Jepang mengklaim bahwa otopsi ikan paus diperlukan untuk menentukan pola makan dan usia hewan, tetapi kritikus menilai penelitian tersebut sebagai dalih untuk melakukan perburuan ikan paus komersial dan menganggap hasilnya memiliki sedikit makna.

Pada Maret 2014, Mahkamah Internasional mendukung para kritikus dalam gugatan yang diajukan oleh Australia, yang mendesak Jepang untuk menghentikan penelitian perburuan ikan paus di Antartika. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi program penelitian Jepang di Pasifik Utara, Jepang membatalkan ekspedisi penelitian Antartika selama setahun dan kemudian melanjutkannya dengan program baru yang dianggap sesuai dengan putusan pengadilan (Normile, 2023).

Pada pertemuan dua tahunan IWC pada September 2018 di Brasil, Jepang kembali mengajukan rencana baru untuk melanjutkan perburuan ikan paus komersial, dengan klaim bahwa hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun IWC mengakui bahwa populasi ikan paus minke di Antartika yang mencapai beberapa ratus ribu tidak terancam punah, klaim Jepang tersebut tidak hanya tentang keberlanjutan. Para penentang perburuan ikan paus (*anti-whaling*) mengatakan bahwa praktik perburuan berdarah terhadap mamalia ini tidaklah manusiawi. Oleh karena itu, IWC menolak proposal Jepang dan mengadopsi resolusi yang menekankan bahwa tujuan IWC adalah untuk memastikan pemulihan populasi mamalia laut ke tingkat pra-industri dan mengonfirmasi moratorium perburuan ikan paus komersial. Kombinasi dari dua keputusan ini menjadi pemicu pengumuman keluarnya Jepang pada bulan Desember (Normile, 2023) dan secara resmi keluar pada 30 Juni 2019.

Dampak Keluarnya Jepang dari *International Whaling Commission* (IWC)

Pemerintah Jepang mengatakan mereka harus meninggalkan IWC karena badan tersebut tidak dapat mengizinkan perburuan ikan paus komersial. Namun, beberapa informasi tampaknya menunjukkan bahwa ada alasan yang berbeda. Selain itu, Shinzo Abe, perdana menteri Jepang, adalah perwakilan pemilih di Shimonoseki, salah satu pelabuhan perburuan utama di negara itu. Selain itu, Abe adalah anggota Partai Demokrat Liberal, yang terdiri dari politisi berpengaruh yang berasal dari kota-kota yang memiliki hubungan kuat dengan perburuan ikan paus, dan mereka telah berusaha

keras untuk mendorong perburuan ikan paus komersial untuk terus berlanjut. Bahkan operator perburuan ikan paus Jepang telah mempertanyakan kemungkinan keuntungan finansial dari proposal Jepang untuk melanjutkan perburuan ikan paus komersial. Di Jepang, konsumsi daging ikan paus rata-rata setiap tahun hanya 30 gram (Cabrera, 2019).

Namun, salah satu aspek paling mengejutkan dari penarikan Jepang dari IWC adalah keputusannya untuk mengakhiri operasi perburuan ikan paus di kawasan perlindungan ikan paus Samudera Selatan. Melanjutkan dan mempromosikan perburuan ikan paus komersial di wilayah ini selalu menjadi tujuannya. Faktor keuangan dan keinginan terus-menerus orang Jepang untuk mengonsumsi produk ikan paus juga dapat menjadi alasannya. Pada Januari 2018, Badan Perikanan Jepang melaporkan bahwa mereka akan mengajukan rencana untuk memperbarui armada perburuan ikan paus di perairan jauh mereka, menunjukkan bahwa Jepang tidak memiliki minat untuk meninggalkan IWC. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa mereka mencari dana untuk memastikan kelangsungan operasi perburuan ikan paus mereka di Antartika dalam jangka panjang (Cabrera, 2019)

Kepergian Jepang dinilai menunjukkan perubahan bagi IWC. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari seratus tahun, pembantaian mamalia laut akan berakhir di Samudera Selatan. Anggota IWC juga akan dapat berkonsentrasi pada pengalokasian sumber daya dan upaya mereka untuk mendorong penggunaan non-lethal ikan paus di seluruh dunia (pariwisata dan penelitian ilmiah), serta program yang membantu mamalia laut ini mengatasi sejumlah risiko yang meningkat seperti perubahan iklim, polusi, tabrakan dengan perahu, terjerat jaring ikan, sampah laut, dan lain sebagainya yang mengancam pelestarian jangka panjang mereka (Cabrera, 2019).

Perhentian perburuan ikan paus di perairan internasional merupakan langkah maju menuju pelestarian ikan paus, ekosistem laut, serta planet kita. Kotoran ikan paus, sangat penting untuk berkembangnya fitoplankton, yang merupakan tanaman mikroskopis yang memberi makan dan mendukung kehidupan berbagai spesies zooplankton, yang merupakan inti dari jaring trofik laut lainnya. Lebih dari 50% oksigen planet ini dihasilkan oleh tumbuhan laut, menurut penelitian saat ini. Melindungi ikan paus, yang berkontribusi pada kelimpahan oksigen, sangat penting. Populasi ikan paus yang sehat sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas samudera untuk menyerap karbon dioksida, yang merupakan setengah dari oksigen yang kita hirup sepanjang hidup kita (Cabrera, 2019). Akan

tetapi, kekhawatiran lainnya muncul di mana keluarnya Jepang dari IWC berpeluang menginspirasi negara lain, untuk melakukan hal yang sama. Negara-negara harus bertanggung jawab dan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap spesies laut, dengan menerapkan sanksi dan melarang Jepang menangkap ikan di perairan mereka sendiri. Jepang masih menjadi pengamat IWC saat ini. Namun, jika mereka tidak kembali ke IWC, negara tersebut kemungkinan besar tidak akan lagi berpartisipasi dalam diskusi internasional tentang perburuan paus di masa depan (Bo, 2021).

CONCLUSION

Isu perburuan ikan paus memiliki dimensi yang kompleks, melibatkan aspek budaya, ekonomi, sains, dan lingkungan. Kesepakatan internasional, seperti *International Whaling Commission* (IWC), kemudian hadir untuk menciptakan kerangka regulasi yang seimbang dalam mengatasi isu-isu ini. Keluarnya Jepang dari IWC mencerminkan tantangan dalam mencapai konsensus global terkait perlindungan ikan paus dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut.

Dalam konteks penelitian ini, analisis menggunakan Teori Rezim Internasional memberikan pemahaman tentang bagaimana aturan dan kebijakan internasional terkait perburuan paus dibentuk, diadopsi, dan diimplementasikan oleh negara-negara yang terlibat, termasuk Jepang. Konflik antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi serta budaya menjadi jelas, dan keputusan keluarnya Jepang dari IWC merupakan hasil dari dinamika yang kompleks ini.

Pada periode pemerintahan Shinzo Abe (2015-2018), Jepang mengimplementasikan kebijakan kontroversial terkait penangkapan ikan paus melalui program NEWREP-A di Antartika dan NEWREP-NP di Pasifik Utara. Meskipun mengklaim tujuan kedua program adalah penelitian ilmiah dan keberlanjutan. Program NEWREP-A disebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap ekosistem laut Antartika dan menerapkan manajemen berkelanjutan terhadap penangkapan paus. Inisiatif ini pada awalnya menyiratkan kepatuhan Jepang akan rezim *International Whaling Commission* untuk turut berkontribusi terhadap *scientific whaling* dengan mendapat izin khusus. Akan tetapi, pada realitanya Jepang telah menangkap paus dengan jumlah besar dari sebelumnya, hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap niat sebenarnya. Upaya Jepang untuk melanjutkan perburuan ikan paus komersial di Pasifik Utara melalui NEWREP-NP juga kian memicu kontroversi.

Pada akhirnya, keputusan Jepang untuk meninggalkan *International Whaling*

Commission (IWC) pada Desember 2018 mengejutkan sejumlah pihak dan menuai kritik global. Jepang menggunakan klausa dalam traktat IWC yang mengizinkan penangkapan ikan paus untuk tujuan ilmiah sebagai dasar kebijakannya. Meskipun Jepang mengklaim bahwa penelitian ini penting untuk ilmu pengetahuan, banyak pihak melihatnya sebagai dalih untuk melanjutkan perburuan ikan paus komersial yang telah dilarang oleh moratorium IWC sejak 1986. Dan juga, meskipun beberapa langkah pengaturan ulang dan revisi dilakukan oleh Jepang sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Panel Ahli dan *Scientific Committee* IWC, keputusan untuk keluar dari IWC dan melanjutkan perburuan ikan paus di wilayah sendiri membuktikan bahwa segala tindakan negara selalu menjadi fokus langsung dari pembentukan rezim internasional dan perilaku negara yang cenderung berubah bersifat subyektif terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.

Keluarnya Jepang dari IWC berdampak pada perburuan ikan paus di wilayah perairan internasional, terutama di Samudra Selatan yang menjadi fokus perburuan ikan paus. Dampak positif dari keluarnya Jepang dapat dilihat dari perspektif konservasi dan perlindungan ikan paus. Penghentian perburuan ikan paus di Samudra Selatan merupakan langkah penting menuju pelestarian mamalia laut yang semakin terancam akibat berbagai ancaman seperti perubahan iklim, polusi, dan benturan dengan kapal. Ini juga memberikan peluang bagi komunitas internasional untuk lebih fokus pada upaya konservasi dan penelitian ilmiah yang bersifat non-lethal. Namun, dampak negatifnya termasuk pada kekhawatiran yang di mana keluarnya Jepang dari IWC berpeluang menginspirasi negara lain, untuk melakukan hal yang sama. Negara-negara harus bertanggung jawab dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Selain itu, keputusan ini juga dapat meningkatkan tekanan terhadap populasi ikan paus di perairan Jepang, terutama jika tidak diatur secara ketat.

REFERENCES

- Aditama, I. G. K. (2017). PENYEBAB JEPANG MELAKUKAN PENANGKAPAN PAUS DI ANTARTIKA. *Journal of International Relations, Volume 3*(Nomor 2), 52-59.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/16613/15985>
- Airlangga, B. D. (2014). IMPLEMENTASI KEANGGOTAAN JEPANG DALAM INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC) TERKAIT KEBIJAKAN SCIENTIFIC WHALING. *Jurnal Analisis Hubungan*

Internasional, Vol. 3(3), 899-917.

[https://journal.unair.ac.id/JAHI@implementasi-keanggotaan-jepang-dalam-international-whaling-commission-\(iwc\)-terkait-kebijakan-scientific-whaling-article-8130-media-131-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/JAHI@implementasi-keanggotaan-jepang-dalam-international-whaling-commission-(iwc)-terkait-kebijakan-scientific-whaling-article-8130-media-131-category-8.html)

Animal Welfare Institute. (n.d.). JAPANESE WHALING. Animal Welfare Institute. Retrieved October 27, 2023, from <https://awionline.org/content/japanese-whaling>

Ari, T. (2018). (PDF) INTERNATIONAL REGIME THEORIES. Anadolu University. Retrieved November 24, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/332848852_International_Regime_Theories

Bo, L. (2021). WHALING RESUMES IN JAPAN AND THE CONSEQUENCES OF IT. Earth.Org. Retrieved November 30, 2023, from <https://earth.org/whaling-resumes-in-japan-and-the-consequences-of-it/>

Cabrera, E. (2019). JAPAN OPTS OUT OF THE IWC: WHAT ARE THE IMPACTS? PACIFIC WHALE FOUNDATION. Retrieved November 30, 2023, from <https://www.pacificwhale.org/japan-opts-out-of-the-iwc-what-are-the-impacts/>

Fadli, M. R. (2021). MEMAHAMI DESAIN METODE PENELITIAN KUALITATIF. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54

Fitzmaurice, M. (n.d.). (2023) INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING. United Nations - Office of Legal Affairs. Retrieved October 25, 2023, from <https://legal.un.org/avl/ha/icrw/icrw.html>

Holm, F. (2019). AFTER WITHDRAWAL FROM THE IWC: THE FUTURE OF JAPANESE WHALING. *The Asia-Pacific Journal*, Vol. 17 (Issue 4, Number 4). <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27540.45441>

The Institute of Cetacean Research. (n.d.). (2023) OUTLINE OF THE NEW SCIENTIFIC WHALE RESEARCH PROGRAM IN THE ANTARCTIC OCEAN (NEWREP-A). ICR : NEWREP-A outline. Retrieved from <https://www.icrwhale.org/NEWREP-AgaiyouEng.html>

The Institute of Cetacean Research. (n.d.). (2023) *OUTLINE OF THE NEW SCIENTIFIC WHALE RESEARCH PROGRAM IN THE WESTERN NORTH PACIFIC (NEWREP-NP)*. ICR : NEWREP-NP outline. Retrieved November 30, 2023, from <https://www.icrwhale.org/NEWREP-NPgaiyouEng.html>

- International Whaling Commission. (n.d.). (2023) INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. International Whaling Commission: IWC. Retrieved October 25, 2023, from <https://iwc.int/en/>
- International Whaling Commission. (n.d.). (2023), *SCIENTIFIC PERMIT WHALING*. INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. Retrieved November 30, 2023, from <https://iwc.int/management-and-conservation/whaling/permits>
- Khatimi, H. (2020, October 6). KELUARNYA JEPANG DARI INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC) TAHUN 2018. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved November 20, 2023, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55573/1/HIJRIA%20KHATIMI.FISIP.pdf>
- McCurry, J. (2021, December 26). JAPAN'S WHALING TOWN STRUGGLES TO KEEP 400 YEARS OF TRADITION ALIVE. The Guardian. Retrieved October 25, 2016, from <https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/japans-whaling-town-struggles-to-keep-400-years-of-tradition-alive>
- Nadratur, R. (2021). UPAYA JEPANG MENGADAPTASI REZIM INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC) DALAM MELAKSANAKAN PERBURUAN PAUS PADA TAHUN 1986-2018 [Diploma thesis, Universitas Andalas.]. Retrieved Oktober 25, 2023, from <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/77706>
- Normile, D. (2023). WHY JAPAN'S EXIT FROM INTERNATIONAL WHALING TREATY MAY ACTUALLY BENEFIT WHALES. Retrieved December 1, 2023, from <https://www.science.org/content/article/why-japan-s-exit-international-whaling-treaty-may-actually-benefit-whales>
- Nova, F. E. (2019). PROGRAM PENELITIAN PAUS OLEH JEPANG DITINJAU DARI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 3, 417-436. <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24815/kanun.v21i3.14197?domain=https://jurnal.usk.ac.id>
- Takahashi, J., Kalland, A., Moeran, B., & Bestor, T. C. (1989). JAPANESE WHALING CULTURE: CONTINUITIES AND DIVERSITIES (2nd ed., Vol. 2). Maritime Anthropological Studies. <https://www.marecentre.nl/mast/documents/Japanesewhalingculture.pdf>

Whale and Dolphin Conservation. (n.d.). (2023) *WHALING IN JAPAN - WHALE & DOLPHIN CONSERVATION USA*. Whale and Dolphin Conservation. Retrieved October 25 from <https://us.whales.org/our-4-goals/stop-whaling/whaling-in-japan/>